



LAPORAN MONITORING
DAN EVALUASI
RENCANA KERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, Alhamdulillah Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan I Tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat selesai dengan baik.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan I Tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada periode Triwulan I Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan I Tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Mamuju, April 2026

Kepala Dinas



AKHMAD TAUFIQ, S.Ip., M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP. 19790102 201101 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

Bab I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Dasar Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Manfaat 4

Bab II KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA 5

Bab III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
 DAERAH TAHUN 2026 15

 3.1 Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 Tahun 2026 16

 3.2 Program dan Kegiatan RENJA Perangkat Daerah 18

Bab IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN 35

 4.1 Analisis Hasil Capaian Kinerja 35

 4.2 Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan RENJA 59

Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 61

 5.1 Kesimpulan 61

 5.2 Rekomendasi 61

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.	Tabel 2.1 Konsistensi Perencanaan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	6
2.	Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	15
3.	Tabel 3.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025	16
4.	Tabel 3.3 Hasil Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja dan Penyerapan Dana Program Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	21
5.	Tabel 4.1 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	35
6.	Tabel 4.2 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	45
7.	Tabel 4.3 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	52
8.	Tabel 4.4 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	54
9.	Tabel 4.5 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupatn Mamuju	58

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
1.	Gambar 4.1 Rekapitulasi Laporan Pelayanan Informasi Keliling Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	36
2.	Gambar 4.2 Rekapitulasi Laporan Pelayanan Sound System Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	37
3.	Gambar 4.3 Rekapitulasi Laporan Publikasi Baligho Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	38
4.	Gambar 4.4 Rekapitulasi Laporan Publikasi Melalui Website Resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	39
5.	Gambar 4.5 Rekapitulasi Laporan Publikasi Melalui Media Sosial Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	40
6.	Gambar 4.6 Rekapitulasi Laporan Publikasi Melalui Relasi Media Online Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	41
7.	Gambar 4.7 Rekapitulasi Laporan Publikasi Melalui Relasi Media Cetak Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	42
8.	Gambar 4.8 Rekapitulasi Laporan Kegiatan Melalui Aduan SP4N - LAPOR Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	43
9.	Gambar 4.9 Laporan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR-SP4N Triwulan I Tahun 2026	44
10.	Gambar 4.10 Rekapitulasi Laporan Kegiatan Fasilitasi Zoom Meeting Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	46
11.	Gambar 4.11 Laporan Triwulan I Penanganan Infrastruktur Blank Spot dan Rekapitulasi Total Usulan Bantuan Akses Internet Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	47
12.	Gambar 4.12 Grafik Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Mamuju	49
13.	Gambar 4.13 Laporan Pengelolaan dan Pemeliharaan Server, Website Serta Aplikasi Pemerintah Di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	50
14.	Gambar 4.14 SK Bupati Mamuju Nomor 145 Tahun 2026 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tahun 2026	53
15.	Gambar 4.15 Laporan Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	55
16.	Gambar 4.16 Laporan Data Email SANAPATI Triwulan I Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dilakukan setiap semester berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Pasal 259 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di singkat RENJA Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2026 disusun berdasarkan target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan RENJA Tahun 2026 dan diselaraskan realisasi anggaran program/kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2026, melalui mekanisme analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada dokumen pelaksanaan anggaran untuk menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya baik teknis maupun non teknis serta alternatif pemecahan/tindak lanjut yang akan dilakukan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 70 Tahun 2016);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan laporan evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026, revidi isu strategis pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun selanjutnya.

Adapun tujuan di susunnya Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2026 antara lain :

1. Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran;
3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran dan penyerapan dana indikator kegiatan RENJA Perangkat Daerah dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun RENJA tahun berikutnya.

1.4. Manfaat

Hasil evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun berikutnya;
2. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah; dan
4. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

BAB II

KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten.

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Output atau hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.

Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan penganggaran RENJA Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok, sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif Akhir Tahun RENJA Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada realisasi Akhir Tahun pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Konsistensi Perencanaan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kode	RENJA Perangkat Daerah					Dokumen Anggaran				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN PROGRAM										
<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>										
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kabupaten Mamuju	1. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.935.119.760	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kabupaten Mamuju	1. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.935.119.760
			2. Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah					2. Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah		
			3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor					3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor		
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	24.905.260	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	24.905.260
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.864.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.864.500

2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kabupaten Mamuju	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokume n	7.252.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kabupate n Mamuju	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.252.000
2 16 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kabupaten Mamuju	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokume n	2.714.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kabupate n Mamuju	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.714.000
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.964.760	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupate n Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4.964.760
2 16 01 2.01 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	5000 Data	4.308.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupate n Mamuju	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	5000 Data	4.308.000
2 16 01 2.01 10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 BA	1.802.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupate n Mamuju	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 BA	1.802.000
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	100%	2.421.414.161	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupate n Mamuju	Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	100%	2.421.414.161
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	2.317.069.161	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kabupate n Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ Bulan	2.317.069.161

2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Penggajian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	95.026.000	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Penggajian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	95.026.000
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.319.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.319.000
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	9.590.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	9.590.000
2 16 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.590.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.590.000
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	143.835.019	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	143.835.019
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.195.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.195.000
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.308.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.308.000

2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.168.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.168.000
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	123.164.019	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	123.164.019
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	100%	23.051.240	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	100%	23.051.240
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Kabupaten Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	23.051.240	Pengadaan Mebel	Kabupaten Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	23.051.240
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kabupaten Mamuju	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	260.293.580	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kabupaten Mamuju	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	260.293.580
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	232.446.680	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	232.446.680
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.846.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.846.900
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	52.030.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	52.030.500

2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	45.880.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	45.880.500
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	6.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	6.150.000
SASARAN PROGRAM										
<i>Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat</i>										
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Mamuju	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	100%	273.585.400	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Mamuju	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	100%	273.585.400
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100%	273.585.400	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100%	273.585.400
2 16 02 2.01 14	Relasi Media	Kabupaten Mamuju	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	12 Lap	146.672.000	Relasi Media	Kabupaten Mamuju	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	12 Lap	146.672.000

2 16 02 2.01 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Mamuju	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	60 Komunitas	38.980.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Mamuju	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	60 Komunitas	38.980.000
2 16 02 2.01 17	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	30 Permohonan	6.937.000	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	30 Permohonan	6.937.000
2 16 02 2.01 20	Diseminasi Informasi	Kabupaten Mamuju	Persentase Khalayak Yang Terpapar Informasi Publik	100 Persen	37.664.000	Diseminasi Informasi	Kabupaten Mamuju	Persentase Khalayak Yang Terpapar Informasi Publik	100 Persen	37.664.000
2 16 02 2.01 22	Penyusunan Konten	Kabupaten Mamuju	Jumlah Konten Informasi Publik	20 Konten	43.332.400	Penyusunan Konten	Kabupaten Mamuju	Jumlah Konten Informasi Publik	20 Konten	43.332.400
SASARAN PROGRAM										
Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien										
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100%	113.835.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100%	113.835.000
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	86%	113.835.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	86%	113.835.000

2 16 03 2.02 18	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Mamuju	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	33 Perangkat Daerah	13.789.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Mamuju	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	33 Perangkat Daerah	13.789.000
2 16 03 2.02 21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kabupaten Mamuju	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	36.995.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kabupaten Mamuju	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	36.995.000
2 16 03 2.02 23	Koordinasi pengelolaan Data dan informasi	Kabupaten Mamuju	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dok	63.051.000	Koordinasi pengelolaan Data dan informasi	Kabupaten Mamuju	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dok	63.051.000
SASARAN PROGRAM										
<i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan</i>										
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	33.313.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	33.313.000
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan	100%	33.313.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan	100%	33.313.000

2 20 02 2.01.17	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kabupaten Mamuju	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	80 Persen	2.581.000	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kabupaten Mamuju	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	80 Persen	2.581.000
2 20 02 2.01.18	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kabupaten Mamuju	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	80 Persen	7.645.000	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kabupaten Mamuju	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	80 Persen	7.645.000
2 20 02 2.01.22	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Satu Data Daerah	12 Laporan	23.087.000	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Satu Data Daerah	12 Laporan	23.087.000
SASARAN PROGRAM										
<i>Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah</i>										
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten Mamuju	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	32.516.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten Mamuju	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	32.516.000
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	28.996.000	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	28.996.000

2 21 02 2.01 05	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Lap	12.270.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Lap	12.270.000
2 21 02 2.01 07	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	16.726.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	50 Perangkat Daerah	16.726.000
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	100%	3.520.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	100%	3.520.000
2 21 02 2.02 02	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Perangkat Daerah	3.520.000	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Perangkat Daerah	3.520.000
Total					3.388.369.160					3.388.369.160

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2026

BAB III
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dimuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 2025-2029 :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
OPTIMALISASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DENGAN MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL YANG AMAN BERBASIS DATA		INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	2,50	2,75	2,80	2,85	2,90	3,00
	S1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	65	70	75	80	85	90
	S2 : Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	50	60	70	80	90	100
	S3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,94	2,00	2,15	2,25	2,45	2,75
	S4 : Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	50	60	70	80	90	100
	S5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	AA	AA

* Huruf yang di Bold adalah Kondisi akhir yang ingin di capai pada tahun berkenaan
Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3.1 Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2026

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026 TW I
(1)	(2)	(3)	(4)
	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	2,75	Masih Tahap Sosialisasi Indeks PEMDI
S1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	70	33,33 %
S2 : Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	60	20 %
S3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,00	Masih Dalam Tahap Evaluasi
S4 : Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	60	12,5 %
S5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah	BB	Proses

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2026

Secara umum, capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan progres yang berjalan sesuai tahapan perencanaan (*on-track*). Mengingat ini baru memasuki triwulan pertama, beberapa indikator yang bersifat tahunan (*annual*) masih berada dalam tahap sosialisasi, proses administratif, maupun evaluasi.

Berikut adalah rincian capaian berdasarkan masing-masing Sasaran Strategis :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- **Target 2026** : 2,75
- **Realisasi TW I** : Tahap Sosialisasi Indeks PEMDI
- **Capaian** : Pada Triwulan I, fokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada fondasi kesiapan instansi, yang saat ini berada pada **tahap Sosialisasi Indeks PEMDI** (Pemerintahan Digital). Langkah awal ini krusial untuk menyamakan persepsi dan standar implementasi sebelum penilaian indeks SPBE secara komprehensif dilakukan di akhir tahun demi mencapai target target 2,75.

2. S1: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat

- **Indikator** : Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
- **Target 2026** : 70%
- **Realisasi TW I** : 33,33%
- **Capaian** : Kinerja keterbukaan informasi publik menunjukkan tren positif pada awal tahun dengan capaian sebesar **33,33%** dari target tahunan sebesar 70%. Angka ini mencerminkan komitmen dinas dalam pemenuhan hak informasi masyarakat melalui optimalisasi kanal-kanal komunikasi publik pada tiga bulan pertama.

3. S2 : Meningkatnya Implementasi SPBE untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

- **Indikator** : Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi
- **Target 2026** : 60%
- **Realisasi TW I** : 20%
- **Capaian** : Upaya integrasi pelayanan publik secara digital telah terealisasi sebesar **20%** dari target 60%. Akselerasi integrasi sistem aplikasi layanan akan terus ditingkatkan pada triwulan berikutnya guna memastikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat luas.

4. S3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

- **Indikator** : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
- **Target 2026** : 2,00
- **Realisasi TW I** : Masih Dalam Tahap Evaluasi
- **Capaian** : Untuk capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS), saat ini **masih dalam tahap evaluasi** internal terhadap data sektoral yang

dikumpulkan. Hasil evaluasi awal ini akan menjadi dasar intervensi program peningkatan kualitas data statistik pada triwulan mendatang agar target indeks sebesar 2,00 dapat terpenuhi.

5. **S4 : Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah**

- **Indikator** : Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- **Target 2026** : 60%
- **Realisasi TW I** : 12,5%
- **Capaian** : Realisasi pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian pada TW I tercatat sebesar **12,5%** dari target tahunan 60%. Capaian awal ini mencakup penilaian mandiri kematangan keamanan informasi internal dan penerapan sertifikat elektronik pada beberapa sistem prioritas.

6. **S5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

- **Indikator** : Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- **Target 2026** : BB
- **Realisasi TW I** : Proses
- **Capaian** : Dalam rangka mencapai predikat akuntabilitas kinerja "**BB**", pada Triwulan I ini instansi sedang berada dalam **proses penyusunan dan penyelarasan dokumen** akuntabilitas, reviu berjenjang, serta penguatan implementasi SAKIP di lingkungan perangkat daerah.

3.2 Program dan Kegiatan RENJA Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada RENJA Tahun 2026 merancang pelaksanaan 5 program, 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang meliputi tiga urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu program kegiatan, kegiatan serta sub kegiatan yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator kinerja dalam RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

Pagu program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp.3.388.369.160 yaitu untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.935.119.760, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp.273.585.400, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp. 113.835.000, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp.33.313.000 dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp.32.516.000.

Berikut disampaikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sebagai berikut :

1. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Untuk Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
 - Relasi Media
 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Diseminasi Informasi
 - Penyusunan Konten
- 3. Untuk Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
- 4. Untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 5. Untuk Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Kabupaten/Kota
 - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hasil pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyerapan dana program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Hasil Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja dan Penyerapan Dana Program Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2026																									
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/8 x100%	16	17									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANO KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			20.888.116.113		-	3.930.188.609	600.000.000							600.000.000	600.000.000	8,88	2,42						
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.934.694.713		-	3.642.386.209	600.000.000							600.000.000	600.000.000	11,38	2,79	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu (%)	100			100									0	0	0,00							
			Persentase tertib ketatausahaan kantor (%)	100			100									0	0	0,00							
			Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu (%)	100			100									0	0	0,00							
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			144.031.500		-	42.031.500	-							-	-	0,00	0,00						
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel																							
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.346.500		-	20.346.500	-							-	-	0,00	0,00						
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0	2	0								0	0	0,00							
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			26.262.000		-	6.262.000	-							-	-	0,00	0,00						
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0	1	0								0	0	0,00							
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			7.500.000		-	1.500.000	-							-	-	0,00	0,00						
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0	1	0								0	0	0,00							
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			20.714.000		-	2.714.000	-							-	-	0,00	0,00						
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0	1	0								0	0	0,00							
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			7.500.000		-	1.500.000	-							-	-	0,00	0,00						
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0	1	0								0	0	0,00							
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.109.000		-	4.109.000	-							-	-	0,00	0,00						
		Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		0	12	0								0	0	0,00							
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			9.808.000		-	3.808.000	-							-	-	0,00	0,00						
		Tersedianya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Diumpukan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Diumpukan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.500		0	5000	0								0	0	0,00							

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2028 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA campai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2026)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2028) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sid tahun 2028 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2028)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA sid tahun 2028 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV						
							9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	16=14/8 x100%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	16=14/8 x100%	18	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.802.000		-		1.802.000		-				-		0,00		
		Tertaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	11		0		11		0			0		0		0,00		
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.620.423.194		-		2.880.534.690		500.000.000				500.000.000		82,50		
		Tersedianya Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Standar																	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.083.500.194		-		2.776.689.690		500.000.000				500.000.000		330,00		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		0		33		132				132		132	330,00		
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengulan/Verifikasi Keuangan SKPD			438.104.000		-		95.026.000		-				-		0,00		
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengulan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengulan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		12		0			0		0		0,00		
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12.500.000		-		2.500.000		-				-		0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0			0		0		0,00		
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			86.319.000		-		6.319.000		-				-		0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		0		12		0				0		0	0,00		
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			73.370.000		-		15.370.000		-				-		0,00		
		Tertelolanya Barang Milik Daerah Sesuai Standar																	
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.500.000		-		2.500.000		-				-		0,00		
		Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		0		12		0				0		0	0,00		
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			60.870.000		-		12.870.000		-				-		0,00		
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		0		12		0				0		0	0,00		
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			195.000.000		-		40.000.000		-				-		0,00		
		Tertelolanya Administrasi Kepegawaian Dinas Konfirmasi sesuai Standar																	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			125.000.000		-		25.000.000		-				-		0,00		
		Tersedianya Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		2		0				0		0	0,00		
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			70.000.000		-		15.000.000		-				-		0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2028 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2028 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2028)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2028 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
									I		II		III		IV											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/8 x 100%		16	17
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%					
			Tersedianya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	10	0	5	0	0									0	0	0,00						
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				799.534.019	-	146.534.019	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa Dinas Kominfo																								
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000	-	2.000.000	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	1	0	0										0	0	0,00						
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor				11.202.000	-	3.202.000	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	0	2	0	0										0	0	0,00						
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000	-	15.000.000	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	0	2	0	0										0	0	0,00						
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.168.000	-	3.168.000	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	1	0	0										0	0	0,00						
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				688.164.019	-	123.164.019	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0	12	0	0										0	0	0,00						
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				324.520.000	-	76.520.000	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Kominfo yang Berkualitas																								
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				64.520.000	-	11.520.000	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	0	6	0	0										0	0	0,00						
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				260.000.000	-	65.000.000	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	0	4	0	0										0	0	0,00						
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.451.590.000	-	261.346.000	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah																								
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.261.590.000	-	231.346.000	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	0	12	0	0										0	0	0,00						
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.000.000	-	30.000.000	-									-	-	0,00	0,00					
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	12	0	0										0	0	0,00						
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				326.126.000	-	80.030.000	-									-	-	0,00	0,00					

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2028 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2028) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2028 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2028)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2028 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV								
					8	9	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/8 x100%										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	16	17	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah																						
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			90.000.000			-		18.000.000			-					-		-	0,00	0,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		0							0		0			0,00			
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			169.376.000			-		45.880.000			-					-		-	0,00	0,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		0		7		0							0		0			0,00			
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.750.000			-		6.150.000			-					-		-	0,00	0,00		
			Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		10		0						0		0			0,00			
		2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			25.000.000			-		10.000.000			-					-		-	0,00	0,00		
			Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0						0		0			0,00			
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.861.986.400			-		273.986.400			-					-		-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERBANDIAN	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100				100								0		0			0,00			
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.861.986.400			-		273.986.400			-					-		-	0,00	0,00		
			Tertelolannya Diseminasi dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju																						
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			930.072.000			-		150.072.000			-					-		-	0,00	0,00		
			Tertaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi diwarn pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	12		0		12		0						0		0			0,00			
		2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			278.280.000			-		38.280.000			-					-		-	0,00	0,00		
			Tertaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	60		0		60		0						0		0			0,00			
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			20.237.000			-		6.237.000			-					-		-	0,00	0,00		
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan penundaan (Permohonan)	5		0		5		0						0		0			0,00			
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			100.000.000			-		-			-					-		-	0,00	0,00		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
						7			8		9		10		11			12		13				14 = 7 + 13		15=14/8 x100%	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
			Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	30		0		0		0							0		0		0,00	0,00				
		2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi				232.664.000		-		37.664.000			-					-		-	0,00	0,00				
			Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	100		0		100		0							0		0		0,00					
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten				290.732.400		-		41.732.400			-					-		-	0,00	0,00				
			Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	300		0		270		0							0		0		0,00					
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				881.636.000		-		113.836.000			-					-		-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
			Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Pemerintah Secara Digital (Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik)	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	100				100									0		0		0,00					
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				881.636.000		-		113.836.000			-					-		-	0,00	0,00				
			Terselenggaranya Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota																								
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				213.789.000		-		13.789.000			-					-		-	0,00	0,00				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	33		0		33		0							0		0		0,00					
		2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				296.995.000		-		36.995.000			-					-		-	0,00	0,00				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	25		0		25		0							0		0		0,00					
		2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				370.751.000		-		63.051.000			-					-		-	0,00	0,00				
			Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1		0		1		0							0		0		0,00					
		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				226.913.000		-		38.113.000			-					-		-	0,00	0,00				
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				226.913.000		-		38.113.000			-					-		-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
			Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	100				100									0		0		0,00					
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				226.913.000		-		38.113.000			-					-		-	0,00	0,00				
			Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Mamuju																								
		2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				60.000.000		-		12.000.000			-					-		-	0,00	0,00				

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2028 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2028) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2028 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2028)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2028 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
								I		II		III		IV			14 = 7 + 13		16=14/8 x100%				
								8	10	11	12	13	14 = 7 + 13	16=14/8 x100%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	16=14/8 x100%	16	17							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
			Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100	0		80		0						0		0		0,00			
	2.20.02.2.01.0018		Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			50.500.000	-		10.700.000		-						-		-	0,00	0,00		
			Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi/ dan/atau data induk (%)	100	0		80		0						0		0		0,00			
	2.20.02.2.01.0022		Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral			115.413.000	-		15.413.000		-						-		-	0,00	0,00		
			Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	12	0		12		0						0		0		0,00			
	2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			218.616.000	-		32.616.000		-						-		-	0,00	0,00		
	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			218.616.000	-		32.616.000		-						-		-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	100			100								0		0		0,00			
	2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			148.996.000	-		28.996.000		-						-		-	0,00	0,00		
			Terlaksananya Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah																				
	2.21.02.2.01.0005		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			32.270.000	-		12.270.000		-						-		-	0,00	0,00		
			Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	10	0		1		0						0		0		0,00			
	2.21.02.2.01.0007		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			116.726.000	-		16.726.000		-						-		-	0,00	0,00		
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	70	0		60		0						0		0		0,00			
	2.21.02.2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			67.520.000	-		3.520.000		-						-		-	0,00	0,00		
			Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi																				
	2.21.02.2.02.0002		Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			67.520.000	-		3.520.000		-						-		-	0,00	0,00		
			Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	33	0		5		0						0		0		0,00			
			JUMLAH			21.110.644.113	-		4.000.816.809		600.000.000						600.000.000		600.000.000				
			Rata-rata capaian kinerja (%)																	7,60	2,37		
			Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

3.2.1 Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Capaian Kinerja Program

Rata-rata tingkat capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mencapai 4,58 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”.

b. Capaian Kinerja Anggaran

Total anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.935.119.760 dengan realisasi sebesar Rp. 697.275.677 atau mencapai 3,89 persen dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Adapun rata-rata capaian output kegiatan masih sangat rendah dikarenakan adanya penyesuaian efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Program ini didukung oleh 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 100 persen dan terealisasi sampai triwulan 1 sebesar 0,63 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 0,72 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun dimana target 2 dokumen/laporan, terealisasi 0 dokumen/laporan Renja Perubahan TA 2026 dan Renja TA 2027 atau 0,00 persen dan kinerja keuangan mencapai 0,63 persen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan yang disusun dimana target 2 dokumen/laporan, terealisasi 0 dokumen/laporan RKA pokok dan perubahan atau 0,00 persen dan kinerja keuangan mencapai 0,00 persen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen DPA dan DPPA yang disusun dimana target 2 dokumen/laporan, terealisasi 0 dokumen/laporan atau 0,00 persen dan kinerja keuangan mencapai 2,99 persen.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana dengan target 12 dokumen/laporan, terealisasi 3 dokumen/laporan atau 5,00 persen. Namun kinerja keuangannya hanya mencapai 0,68 persen saja.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan indikator jumlah Data Statistik Sektoral Dearah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah dimana dengan target 5.000 Data, terealisasi 0,00 persen dan kinerja keuangan 0,00 persen.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana dengan target 11 Berita Acara dan terealisasi 0,00 persen dan realisasi keuangan 0,00 persen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia dengan target kinerja 100 persen dan realisasi kinerja sampai triwulan 1 sebesar 26,04, dengan kinerja keuangannya mencapai 4,38 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan Capaian kinerja kegiatan mencapai 74,16 persen untuk 41 orang selama 3 bulan dan kinerja keuangan sudah mencapai 4,38 persen. Faktor pendorong capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sudah terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN perbulan dari 33 orang ASN yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Jasa Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi keuangan Perangkat Daerah dengan target 12 Dokumen, terealisasi 3 Dokumen atau mencapai 25,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 5,34 persen.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan keuangan yang disusun dengan target 12 Laporan, terealisasi 3 Dokumen atau mencapai 8,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 0,17 persen.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 12 Laporan dan realisasi sampai triwulan 1 sebesar 0 Laporan atau mencapai 0,00 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 0,00 persen dan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Laporan dan realisasi masih nihil.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100 persen dan realisasi sebesar 0,00 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 1,83 persen dan predikat kinerja sangat tinggi “SR”.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dengan target 2 paket, realisasi kinerja dan keuangan masih nihil.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah bahan logistik yang tersedia dengan target 2 paket, dan realisasi kinerja dan keuangan masih nihil.
 - Sub Keuangan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan dengan target 5 paket dan realisasi kinerja dan keuangan masih nihil.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang dikoordinasikan dengan target 23 Laporan, terealisasi 3 Laporan atau mencapai 13,04 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 2,13 persen.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar dengan target 100 persen sampai dengan triwulan 1 terealisasi 3,57 persen dengan kinerja keuangan sebesar 1,57 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”. yang mana sub kegiatannya tersebut adalah :

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator Jumlah Mebel yang diadakan dengan target 6 Unit dan realisasi kinerjanya sebesar 7,14 persen dimana realisasi keuangan sebesar 7,90 persen.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan target 100 persen terealisasi 5,00 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 1,97 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 12 laporan, terealisasi 3 laporan atau mencapai 5,00 persen dengan kinerja keuangannya 1,77 persen.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 12 laporan, terealisasi 3 laporan atau mencapai 5,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 3,32 persen.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen dan realisasi sampai triwulan 1 mencapai 1,81 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 2,33 persen dan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 dan 4 yang dipelihara dengan target 7 unit, terealisasi 2 unit atau mencapai 6,45 persen dengan kinerja keuangan mencapai 4,49 persen.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 10 unit, realisasi masih nihil.

3.2.2 Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Informatika

a. Capaian Kinerja Program

Rata-rata tingkat capaian kinerja program pengelolaan informasi dan komunikasi publik mencapai 3,40 persen atau dengan predikat sangat rendah “SR”, sedangkan rata-rata tingkat capaian kinerja program pengelolaan aplikasi informatika mencapai 0,00 persen atau dengan predikat sangat rendah “SR”.

b. Capaian Kinerja Anggaran

Total anggaran program pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebesar Rp.273.585.400 dengan realisasi sebesar Rp.30.372.750 atau mencapai 1,84 persen dengan predikat kinerja sangat rendah “SR”, dan program pengelolaan aplikasi informatika sebesar Rp.113.835.000 dengan realisasi sebesar Rp.10,603,759 atau mencapai 1,20 persen dengan predikat kinerja sangat rendah “SR”.

Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat. Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasi 100 persen dan realisasi sampai dengan triwulan 1 mencapai 3,40 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 1,64 persen dan predikat kinerja sangat rendah “ST”.
 - Sub Kegiatan Relasi Media dengan indikator Jumlah Aktivitas relasi media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers. 2. terdaftar di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 3. aktif dalam kegiatan relasi media, dengan target 12 Laporan, terealisasi 12 laporan atau 5,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 2,15 persen.
 - Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dengan indikator Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan target 60 Komunitas, realisasi masih nihil.
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan indikator Jumlah permohonan informasi publik yang disediakan sesuai peraturan perundangan selama triwulan 1 masih nihil.
 - Sub Kegiatan Diseminasi Informasi dengan indikator persentase khalayak yang terpapar informasi publik selama triwulan 1 atau mencapai 6,25 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 1,25 persen.

- Sub Kegiatan Penyusunan Konten dengan indikator Jumlah Konten Informasi Publik dengan target 20 Konten, terealisasi 130 konten atau 9,12 persen, sangat jauh melebihi target dengan kinerja keuangannya mencapai 2,57 persen.

Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika dengan sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien. Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan (100 persen) dengan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 persen dan realisasi sampai dengan triwulan 1 mencapai 0 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 1,20 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan indikator Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan target 33 Perangkat Daerah, terealisasi masih nihil atau 0 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 1,40 persen.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan dengan indikator Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan target 1 Aplikasi, realisasi masih nihil dengan realisasi keuangan sebesar 2,23 persen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan indikator Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah dengan target 1 Dokumen, realisasi masih nihil.

3.2.3 Urusan Pemerintah Bidang Statistik

a. Capaian Kinerja Program

Tingkat capaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral mencapai 0 persen atau dengan predikat sangat rendah “SR”.

b. Capaian Kinerja Anggaran

Total anggaran program penyelenggaraan statistik sektoral sebesar Rp. 33.313.000 dengan realisasi masih nihil.

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk

Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan. Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan (100 persen) dengan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan 100 persen dengan realisasi sampai triwulan 1 masih nihil.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional dengan indikator Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik dengan target 80 persen, realisasi masih nihil.
 - Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dengan indikator Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk dengan target 80 persen, realisasi masih nihil.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Satu Data Daerah dengan target 12 Laporan, realisasi masih nihil.

3.2.4 Urusan Pemerintah Bidang Persandian

a. Capaian Kinerja Program

Tingkat capaian kinerja program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi mencapai 7,04 persen atau dengan predikat sangat rendah “SR”.

b. Capaian Kinerja Anggaran

Total anggaran program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebesar Rp.32.516.000 dengan realisasi sebesar Rp.4.629.800 atau mencapai 2,14 persen dengan predikat kinerja sangat rendah “SR”.

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah. Program ini didukung oleh 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan realisasi sampai dengan triwulan 1 mencapai 10,55 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 2,50 persen dan predikat kinerja Sangat rendah “SR”.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator Jumlah laporan monitoring pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah dengan target 12 laporan, terealisasi 3 laporan atau 9,68 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 0,78 persen.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian dengan target 50 Perangkat Daerah, terealisasi 8 Perangkat Daerah atau 11,43 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 2,97 persen.
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi 100 persen dan realisasi sampai dengan triwulan 1 mencapai 0 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 1,35 persen dan predikat kinerja Sangat rendah “SR”.
- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah target 1 kegiatan, realisasi kinerja masih nihil atau 0 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 1,35 persen.

BAB IV
ANALISIS DAN PERMASALAHAN

4.1 Analisis Hasil Capaian Kinerja

4.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat

Tabel 4.1
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya
Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	70 %	33,33 %

Sumber Data : IKU DISKOMINFOSIP 2025-2029

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

- 1. Terlaksananya Penyebaran Informasi terkait dengan Pawai Mansik Haji 1447 H/2026 M dan Pengibaran Bendera Negara Setengah tiang dan hari berkabung Nasional atas meninggalnya Wakil Presiden RI Ke-6 melalui penyebaran informasi pengumuman kendaraan keliling sebanyak 2 kali;

Gambar 4.1
Rekapitulasi Laporan Pelayanan Informasi Keliling Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jl. K.S. Tubun No.33 Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 91511

Website : diskominfosip.mamujukab.go.id | Email : diskominfosip@mamujukab.go.id

REKAPITULASI LAPORAN PELAYANAN INFORMASI KELILING
TRIWULAN I (PERTAMA) BULAN JANUARI S/D MARET 2026

No	Tanggal	T e m a	Kecamatan
1.	31 – 1 - 2026	NIHIL	NIHIL
2.	15 – 2 - 2026	Pawai Manasik Haji 1447 H / 2026 M	Mamuju
3	3 – 3 - 2025	Pengibaran bendaera negara setengah tiang dan Hari berkabung Nasional atas meninggalnya Wakil Presiden Republik Indonesia Ke - 6	Mamuju
Jumlah Layanan			2 Kali

**Terlampir Laporan setiap bulan*

Mengetahui :

Kepala Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi,



ITA SARI DARMAWATI, S. Sos
NIP. 19730604 200112 2 002

Mamuju, 31 Maret 2026

Pranata Siaran Ahli Muda,



H A S A N, Hs, SE
NIP. 19761026 199903 1 004

Sumber Data : DISKOMINFOSIP 2026

2. Terlaksananya pelayanan Sound System sebanyak 3 kali untuk kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;

Gambar 4.2
Rekapitulasi Laporan Pelayanan Sound System Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

 PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Alamat : Jl. K.S. Tubun No.33 Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 91511 Website : diskominfosip.mamujukab.go.id Email : diskominfosip@mamujukab.go.id				
REKAPITULASI LAPORAN PELAYANAN SOUND SYSTEM TRIWULAN. I (PERTAMA) BULAN JANUARI S/D MARET 2026				
No	Tanggal	Kegiatan	Penerima Layanan	Dasar Kegiatan
1.	31-1-2026	-	-	-
2.	28-2-2026	-	-	-
3.	3-3-2026	Kunjungan Kerja Gubernur Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju	SAPOTA Rumah Jabatan Bupati Mamuju	Surat Perintah Tugas Nomor : B/800.1.11.1/28/III/2026 Tgl. 3 Maret 2026
4.	7-3-2026	Buka puasa bersama serta Peringatan 1 Tahun Kepemimpinan TINA – YUKI	SAPOTA Rumah Jabatan Bupati Mamuju	Surat Perintah Tugas Nomor : B/800.1.11.1/29/III/2026 Tgl. 3 Maret 2026
5.	12-3-2026	Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Marano 2026	POLRESTA Mamuju	Surat Perintah Tugas Nomor : B/800.1.11.1/28/III/2026 Tgl. 3 Maret 2026
Jumlah Layanan				3 Kali
*Terlampir Laporan setiap bulan				
Mengetahui : Kepala Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi,			Mamuju, 31 Maret 2026	
			Pranata Siaran Ahli Muda,	
ITA SARI DARMAWATI, S. Sos NIP. 19730604 200112 2 002				
			H A S A N, Hs, SE NIP. 19761026 199903 1 004	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP 2026

3. Terlaksananya kegiatan pembinaan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) masih belum ada realisasi;
4. Tersedianya data hasil diseminasi informasi kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk publikasi penanganan stunting di Kabupaten Mamuju belum ada realisasi;
5. Terlaksananya diseminasi informasi melalui pembuatan spanduk/baliho informasi hari besar Nasional dan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Mamuju sebanyak 3 Kegiatan;

Gambar 4.3
Rekapitulasi Laporan Publikasi Baligho Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511
Website : diskominfosip.mamujukab.go.id | Email : diskominfosip@mamujukab.go.id

LAPORAN KEGIATAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KONTEN (PUBLIKASI BALIGHO)
BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK

I. DASAR KEGIATAN

- Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Sub Kegiatan Penyusunan Konten T.A 2026.
- Sistem Kerja Kegiatan Peliputan Sub Kegiatan Penyusunan Konten Nomor : B/800.1.11.1/37/II/2026. Tanggal 11 Februari 2026.

II. TUJUAN

Terwujudnya Pelaporan Publikasi Media Luar Ruang (Baligho) pada Triwulan Satu dari Bulan Januari sampai Maret 2026.

III. HASIL KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Publikasi Baligho Bulan Januari adalah Nihil
2. Publikasi Baligho Bulan Februari adalah Nihil
3. Publikasi Baligho Bulan Maret adalah 3 Kegiatan

IV. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 02 April 2026

Kepala Bidang KIP



RAHMANILLAH, S.Sos
NIP. 19790119 200701 2 010

Pengadministrasi Perkantoran



RASMAN,
NIP. 19760601 202521 1 028

Sumber Data : DISKOMINFOSIP 2026

6. Terpublikasinya kegiatan Kepala Daerah dan perangkat daerah Kabupaten Mamuju sebanyak 127 kali selama Januari-Maret Tahun 2026 melalui media sosial dan website Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Publikasi Melalui Website

Gambar 4.4
Rekapitulasi Laporan Publikasi Melalui
Website Resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511
Website : diskominfosip.mamujukab.go.id | Email : diskominfosip@mamujukab.go.id

LAPORAN KEGIATAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KONTEN
LAPORAN PUBLIKASI MELALUI WEBSITE RESMI PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU
BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK

I. DASAR KEGIATAN

- Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Sub Kegiatan Penyusunan Konten T.A 2026.
- Sistem Kerja Kegiatan Peliputan Sub Kegiatan Penyusunan Konten Nomor : B/800.1.11.1/37/II/2026. Tanggal 11 Februari 2026.

II. TUJUAN

Terwujudnya Pelaporan Publikasi Melalui Website Resmi Kabupaten Mamuju pada Triwulan Satu dari Bulan Januari sampai Maret 2026.

III. HASIL KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Publikasi Melalui Website Bulan Januari adalah 4 Kegiatan
2. Publikasi Melalui Website Bulan Februari adalah 7 Kegiatan
3. Publikasi Melalui Website Bulan Maret adalah 31 Kegiatan

IV. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang KIP



RAHMANILLAH, S.Sos
NIP. 19790119 200701 2 010

Mamuju, 02 April 2026
Penata Layanan Operasional



HERNIATI, SE
NIP. 19790523 202521 2 034

Sumber Data : *DISKOMINFOSIP 2026*

- Publikasi Melalui Media Sosial

Gambar 4.5
Rekapitulasi Laporan Publikasi
Melalui Media Sosial Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511
Website : diskominfosip.mamujukab.go.id | Email : diskominfosip@mamujukab.go.id

LAPORAN KEGIATAN
PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KONTEN (PUBLIKASI MELALUI MEDSOS)
BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK

I. DASAR KEGIATAN

- Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Sub Kegiatan Penyusunan Konten T.A 2026.
- Sistem Kerja Kegiatan Peliputan Sub Kegiatan Penyusunan Konten Nomor : B/800.1.11.1/37/II/2026. Tanggal 11 Februari 2026.

II. TUJUAN

Terwujudnya Pelaporan Publikasi Melalui Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju pada Triwulan Satu dari Bulan Januari sampai Maret 2026.

III. HASIL KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Publikasi Bulan Januari Melalui Media Sosial Instagram 13 kali dan Facebook : 9 kali
2. Publikasi Februari Melalui Media Sosial Instagram 22 dan Facebook 22 kali
3. Publikasi Melalui Media Sosial Instagram dan Facebook Bulan Maret : 49 kali 50 Kali

IV. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang



RAHMANILLAH, S.Sos
NIP. 19790119 200701 2 010

Pengadministrasian Umum



MARHUMAH SALIM
NIP. 19760921 202521 2 006

Sumber Data : DISKOMINFOSIP 2026

7. Terlaksananya kerjasama media online sebanyak 4 kali kerjasama menghasilkan 16 rilis berita selama Januari – Maret, dan media cetak belum ada realisasi.
- Media Online

Gambar 4.6
Rekapitulasi Laporan Publikasi
Melalui Relasi Media Online Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511
Website : diskominfosip.mamujukab.go.id | Email : diskominfosip@mamujukab.go.id

LAPORAN KEGIATAN
PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN RELASI MEDIA
BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK

I. DASAR KEGIATAN

- Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Sub Kegiatan Penyusunan Konten T.A 2026.
- Sistem Kerja Kegiatan Peliputan Sub Kegiatan Penyusunan Konten Nomor : B/800.1.11.1/37/II/2026. Tanggal 11 Februari 2026.

II. TUJUAN

Terlaksananya Kerjasama Media Online.

III. HASIL KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Kerjasama Media Bulan Januari adalah Tidak Ada Kerjasama
2. Kerjasama Media Bulan Februari adalah Tidak Ada Kerjasama
3. Kerjasama Media Bulan Maret adalah 4 Media Kerjasama

IV. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 02 April 2026

Mengetahui
Kepala Bidang KIP



RAHMANILLAH, S.Sos
NIP. 19790119 200701 2 010

Penata Layanan Operasional



RASMAN
NIP. 19760601 202521 1 028

Sumber Data : DISKOMINFOSIP 2026

- Media Cetak

Gambar 4.7
Rekapitulasi Laporan Publikasi
Melalui Relasi Media Cetak Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

 PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511 Website : diskominfosip.mamujukab.go.id Email : diskominfosip@mamujukab.go.id	LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN RELASI MEDIA (KERJASAMA MEDIA CETAK) BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK		
I. DASAR KEGIATAN - Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Sub Kegiatan Penyusunan Konten T.A 2026. - Sistem Kerja Kegiatan Peliputan Sub Kegiatan Relasi Media Nomor : B/800.1.11.1/37/II/2026. Tanggal 11 Februari 2026.			
II. TUJUAN Terwujudnya Pelaporan Kerjasama Media Cetak pada Triwulan Satu dari Bulan Januari sampai Maret 2026.			
III. HASIL KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 1. Kerjasama Melalui Media Cetak Bulan Januari adalah Nihil 2. Kerjasama Melalui Media Cetak Bulan Februari adalah Nihil 3. Kerjasama Melalui Media Cetak Bulan Maret adalah Nihil			
IV. PENUTUP Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mamuju, 02 April 2026 <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;">Kepala Bidang KIP  <u>RAHMANILLAH, S. Sos</u> NIP. 197901192007012010</td><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;">Pengadministrasian Perkantoran  <u>RASMAN</u> NIP. 197606012025211028</td></tr></table>		Kepala Bidang KIP  <u>RAHMANILLAH, S. Sos</u> NIP. 197901192007012010	Pengadministrasian Perkantoran  <u>RASMAN</u> NIP. 197606012025211028
Kepala Bidang KIP  <u>RAHMANILLAH, S. Sos</u> NIP. 197901192007012010	Pengadministrasian Perkantoran  <u>RASMAN</u> NIP. 197606012025211028		

Sumber Data : DISKOMINFOSIP 2026

8. Pengelolaan layanan aduan masyarakat melalui LAPOR-SP4N sebanyak 1 aduan selama Triwulan I Tahun 2026, yang mana aduan tersebut telah terdistribusikan ke Perangkat Daerah (PD) yang menangani secara teknis.

Gambar 4.8
Rekapitulasi Laporan Kegiatan
Melalui Aduan SP4N - LAPOR Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511
Website : diskominfosip.mamujukab.go.id | Email : diskominfosip@mamujukab.go.id

LAPORAN KEGIATAN
PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN PELAYAN INFORMASI PUBLIK REKAP ADUAN SPAN LAPOR
BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK

I. DASAR KEGIATAN

- Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Sub Kegiatan Penyusunan Pelayanan Informasi Publik T.A 2026.
- Sistem Kerja Kegiatan Sp4n Lapor Sub Kegiatan Penyusunan Pelayanan Informasi Publik Nomor : B/800.1.11.1/42/II/2026. Tanggal 18 Februari 2026.

II. TUJUAN

Terwujudnya Pelaporan Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Sp4n Lapor pada Triwulan Satu dari Bulan Januari sampai Maret 2026.

III. HASIL KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pengaduan SP4N LAPOR Bulan Januari adalah Nihil
2. Pengaduan SP4N LAPOR Bulan Februari adalah 1 Aduan
3. Pengaduan SP4N LAPOR Bulan Maret adalah Nihil

IV. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 02 April 2026

Kepala Bidang KIP



RAHMANILLAH, S.Sos
NIP. 19790119 200701 2 010

Pranata Humas Ahli Muda

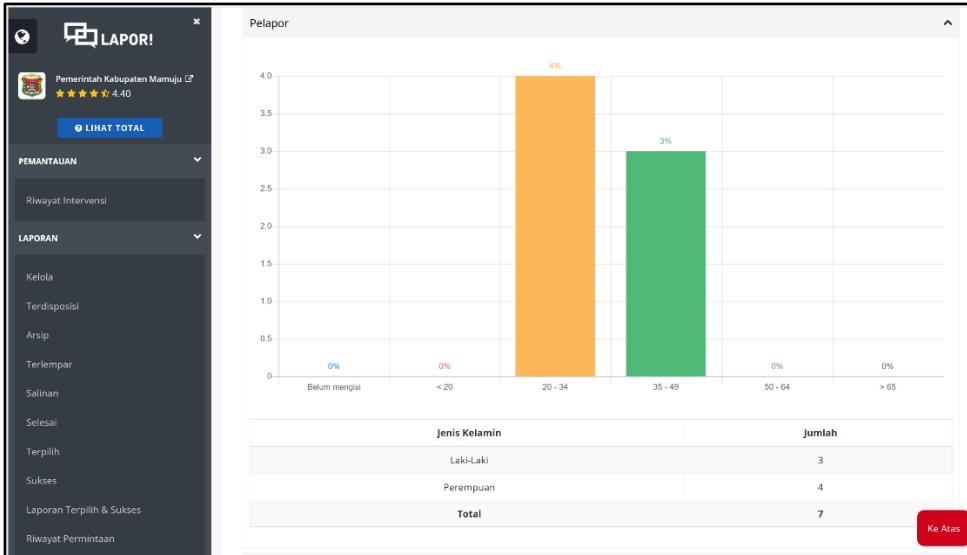
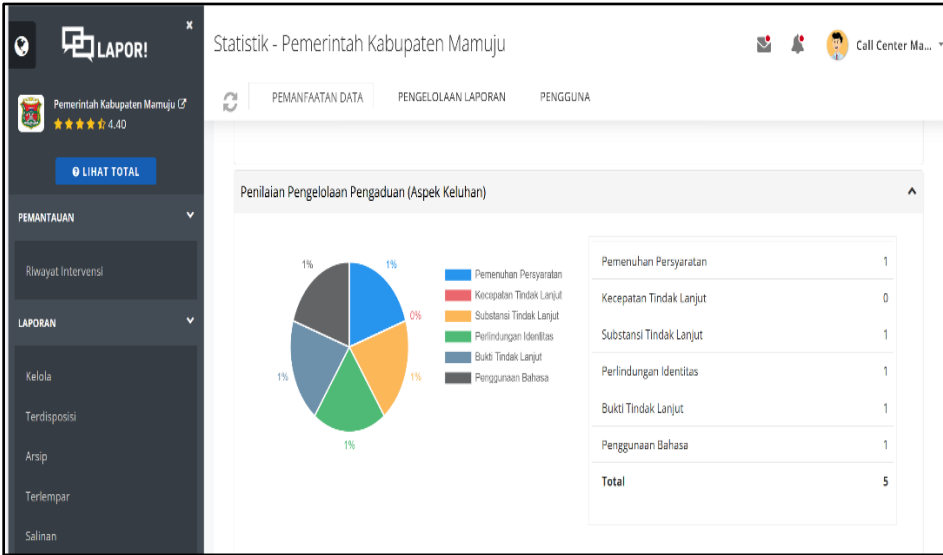
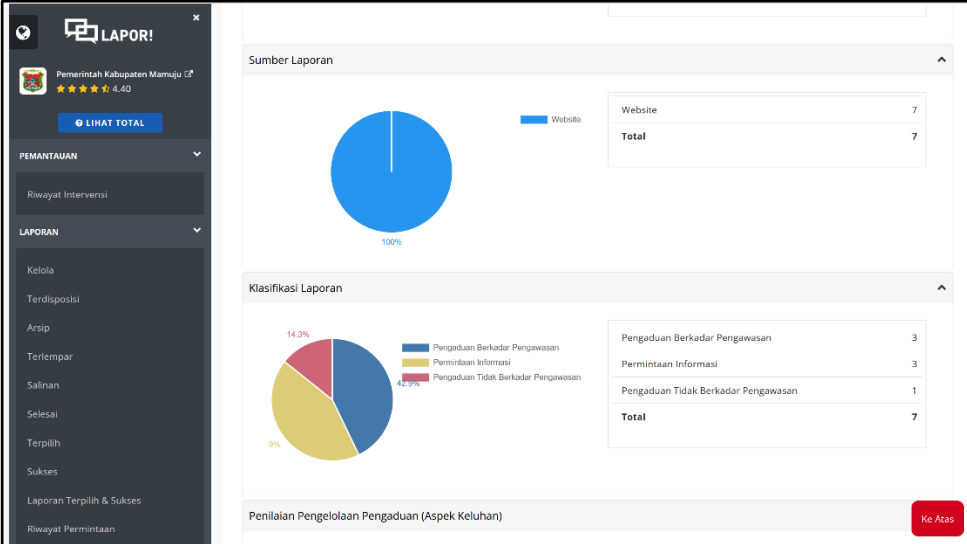
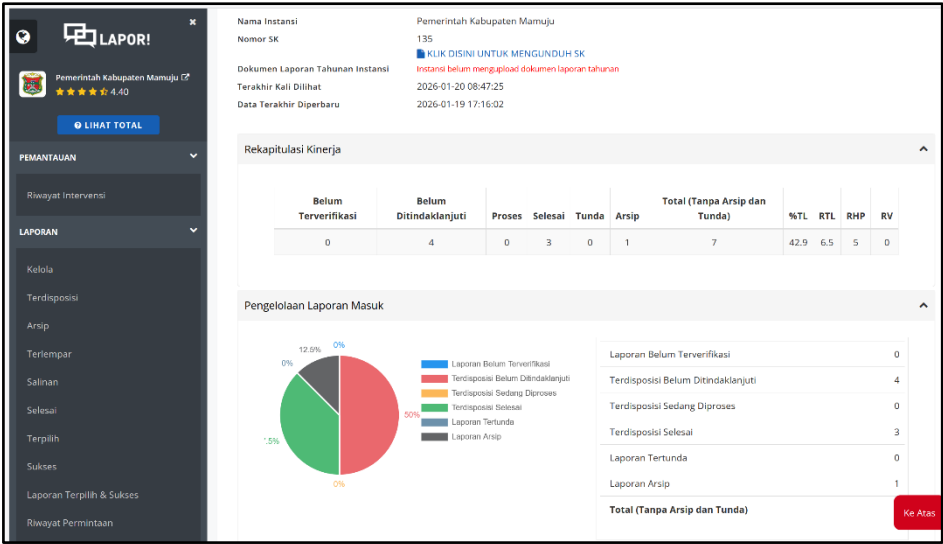


AMRAN AHIL, SE.
NIP. 197706032008011013

Sumber Data : DISKOMINFOSIP 2026

Beberapa Gambar mengenai kondisi aduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR-SP4N, sebagai berikut :

Gambar 4.9
Laporan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR-SP4N
Triwulan I Tahun 2026



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2026

4.1.2 Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

Tabel 4.2
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Implementasi
Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)
untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	60	20

Sumber Data : IKU DISKOMINFOSIP 2025-2029

Pada Sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran dengan indikator kinerja Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meliputi empat domain yaitu kebijakan internal SPBE, Tata kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

- Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :
1. Terlaksananya fasilitasi Zoom Meeting Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) serta Perangkat Daerah sebanyak 23 Kegiatan selama Januari – Maret.

Gambar 4.10
Rekapitulasi Laporan Kegiatan
Fasilitasi Zoom Meeting Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511
Website : diskominfosip.mamujukab.go.id | Email : diskominfosip@mamujukab.go.id

LAPORAN TRIWULAN I
KEGIATAN FASILITASI ZOOM MEETING
Periode : Januari - Maret 2026

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan rapat, koordinasi dan monitoring evaluasi secara daring telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi penggunaan aplikasi Zoom selama Triwulan I (Januari - Maret 2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Program kerja tahun 2026
2. Kebutuhan rapat dan koordinasi secara daring
3. Permintaan dari KDH/WKDH dan Perangkat Daerah

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memfasilitasi pelaksanaan rapat/koordinasi meeting secara daring
2. Mendukung efektifitas komunikasi jarak jauh
3. Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
Januari – Maret 2026
2. Bentuk Kegiatan
 - ✓ Rapat Koordinasi
 - ✓ Sosialisasi
 - ✓ Monitoring & Evaluasi
3. Jumlah Kegiatan

BULAN	JUMLAH KEGIATAN
Januari	8 Kegiatan
Februari	8 Kegiatan
Maret	7 Kegiatan
Total	23 Kegiatan

4. Fasilitasi yang diberikan

- ✓ Pengelolaan link zoom
- ✓ Host dan co Host meeting
- ✓ Bantuan teknis selama kegiatan berlangsung

V. KENDALA DAN HAMBATAN

1. Gangguan jaringan internet (Wifi)
2. Jadwal yang terkadang berubah mendadak

VI. UPAYA PENANGANAN

1. Menyediakan support teknis selama kegiatan (Menggunakan data seluler)
2. Koordinasi intensif dengan penyelenggara kegiatan

VII. PENUTUP

Demikian laporan fasilitasi zoom meeting triwulan I ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan pada triwulan berikutnya kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

Koordinator Lapangan



HAJRAH B. SE
NIP. 19830909 200801 2 010

Mamuju, 2 April 2026

Pembuat Laporan,



SRI PEBRIYANTIA, S.Kep
NIP. 19880224 202521 2 087

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2026

2. Tersedianya data wilayah Kabupaten Mamuju berdasarkan nama Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan nya dengan persentase 19,64 % yang masih dalam kategori BlankSpot.

Gambar 4.11

Laporan Triwulan I Penanganan Infrastruktur Blank Spot dan Rekapitulasi Total Usulan Bantuan Akses Internet Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju



Pemerintah Kabupaten Mamuju

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Alamat : Jl. K.S. Tubun Nomor : 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 91511

Website : diskominfo@mamujukab.go.id | Email : diskominfo@mamujukab.go.id

Laporan Triwulan I (Januari- Maret) Tahun 2026

Penanganan Infrastruktur Blank Spot dan Rekapitulasi Total Usulan Bantuan Akses Internet Kabupaten Mamuju

I. Pendahuluan

Laporan ini disusun sebagai instrumen perekaman data administratif yang menyajikan progres rekapitulasi dan pemetaan usulan penanganan area tanpa sinyal telekomunikasi (blank spot) di wilayah Kabupaten Mamuju per posisi akhir Maret 2026. Pelaksanaan tugas pada triwulan pertama ini difokuskan secara penuh pada inventarisasi, akumulasi data, dan sinkronisasi usulan lintas sektoral hingga Maret 2026.

II. Evaluasi Wilayah Prioritas dan Kendala Teknis

Sesuai dengan basis data pemetaan eksisting, prioritas utama penanganan keterbatasan akses 4G/5G difokuskan pada wilayah dengan tantangan geografis yang tinggi, yakni Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Tommo, Tapalang, Lebani, dan Kepulauan Balabalakang.

Dalam proses inventarisasi dan pengawalan kelayakan usulan bantuan infrastruktur Remote Terminal Ground Segment (RTGS) berbasis satelit (VSAT), tercatat sejumlah konstrain teknis operasional di lapangan sebagai berikut:

- Perangkat infrastruktur memiliki ketergantungan mutlak pada ketersediaan aliran listrik yang stabil secara persisten (24 jam).
- Paket alokasi bantuan tidak dilengkapi dengan kelengkapan sistem penyimpanan daya mandiri (Baterai/UPS) maupun instrumen panel surya.
- Ketiadaan mitigasi daya mandiri ini menyebabkan sejumlah titik usulan, khususnya di wilayah Kepulauan Balabalakang dan pedalaman yang belum terjangkau elektrifikasi maksimal, rentan mengalami penolakan kelayakan teknis (reject) dari pihak penyedia di tingkat pusat.

III. Rekapitulasi Total Usulan dan Sinkronisasi Permohonan Mandiri

Sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat pemerataan akses digital dasar, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah merampungkan sinkronisasi data kebutuhan infrastruktur telekomunikasi. Adapun rekapitulasi total usulan yang tercatat hingga akhir Maret 2026 adalah sebagai berikut:

A. Data Total Akumulasi Usulan Infrastruktur

- Usulan ke Pemerintah Pusat (Kementerian/BAKTI): Telah diajukan dan dikonsolidasikan sebanyak 147 titik usulan baru yang diprioritaskan untuk pemenuhan digitalisasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- Sinergi Usulan Pemerintah Provinsi: Telah dikoordinasikan usulan tambahan sebanyak 19 titik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna mempercepat penetrasi akses internet di tingkat pemerintahan desa dan layanan kesehatan strategis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Sinkronisasi Usulan Bantuan Mandiri (RTGS)

Khusus untuk permohonan bantuan mandiri yang masuk dari berbagai unit kerja sepanjang Triwulan I Tahun 2026, telah dilakukan verifikasi dan sinkronisasi ke dalam sistem usulan RTGS. Tercatat total 39 instansi pemohon dengan rekapitulasi berdasarkan klasifikasi sektor sebagai berikut:

Kategori Sektor	Jumlah Instansi
Sektor Pendidikan (PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK)	21
Sektor Kesehatan (Puskesmas, Pustu, Poskesdes)	5
Sektor Pemerintahan (Desa dan Kelurahan)	5
Sektor Keagamaan (Masjid dan Gereja)	4
Fasilitas Umum (Koperasi dan BUMDesa)	4
Total Keseluruhan	39

IV. Tabel Pemetaan Area Blankspot

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Persentase Blank Spot Area	Total Persentase/ Kecamatan
1	BONEHAU	Banuada	100,00%	18,78%
		Bonehau	10,00%	
		Buttuada	11,00%	
		Hinua	9,00%	
		Kinatang	8,00%	
		Lumika	14,00%	
		Salutiwo	5,00%	
		Mappu	6,00%	
		Tamalea	6,00%	
2	KALUKKU	Belang Belang	0,00%	7,60%
		Beru-Beru	0,00%	
		Guliling	0,00%	
		Kabuloang	0,00%	
		Kalukku	0,00%	
		Kalukku Barat	0,00%	
		Keang	0,00%	
		Pammulukang	0,00%	
		Pokkang	0,00%	
		Sondoang	25,00%	
		Uhaimate	39,09%	
		Sinyonyoi	0,00%	
		Bebanga	20,00%	
		Sinyonyoi Selatan	22,33%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	KALUMPANG	Batu Makkada	100,00%	75,65%
		Kalumpang	16,45%	
		Karama	100,00%	
		Karataun	5,00%	
		Kondo Bulo	4,00%	
		Lasa'	93,00%	
		Limpong	90,00%	
		Makkaliki	85,00%	
		Polio	90,00%	
		Salumakki	100,00%	
		Sandapang	100,00%	
		Siraun	100,00%	
4	KEPULAUAN	Bala Balakang	96,00%	100,00%
		Bala-Balakang Timur	91,00%	
5	MAMUJU	Bambu	0,00%	0,00%
		Batu Pannu	0,00%	
		Karampuang	0,00%	
		Tadui	0,00%	
		Binanga	0,00%	
		Karema	0,00%	
		Mamunyu	0,00%	
		Rimuku	0,00%	
6	PAPALANG	Batu Ampa	5,13%	2,70%
		Boda-Boda	4,00%	
		Bonda	0,00%	
		Papalang	0,00%	
		Salukayu	0,00%	
		Sisango	3,00%	
		Sukadamai	0,00%	
		Toabo	0,00%	
		Topore	0,00%	
7	SAMPAGA	Bunde	0,00%	10,00%
		Kalonding	4,00%	
		Losso	16,00%	
		Salubarana	0,00%	
		Sampaga	0,00%	
		Tanambuah	15,00%	
		Tarailu	0,00%	
		Leling Utara	8,00%	
8	TOMMO	Leling Barat	10,00%	4,04%
		Buana Sakti	0,00%	
		Campaloga	0,63%	
		Kakullasang	0,00%	
		Kalepu	0,00%	
			0,00%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Leling	13.87%	
		Tamemongga	14.00%	
		Sandana	0.00%	
		Tamejarra	0.00%	
		Tommo	0.00%	
		Malino	0.00%	
		Saludengen	10.00%	
		Rantemario	0.00%	
9	SIMBORO	Botteng Utara	0.00%	0.56%
		Botteng	0.00%	
		Tapandullu	3.00%	
		Sumare	2.00%	
		Simboro	0.00%	
		Saletto	0.00%	
		Rangas	0.00%	
		Pati Di	0.00%	
10	TAPALANG	Bela	100.00%	26.00%
		Kopeang	100.00%	
		Orobatu	0.00%	
		Rantedoda	0.00%	
		Taan	15.00%	
		Takandeang	9.00%	
		Tampalang	10.00%	
		Kasambang	0.00%	
		Galung	0.00%	
		Dayanginna	0.00%	
11	TAPALANG BARAT	Dungkait	40.00%	21.17%
		Ahu	0.16%	
		Labuang Rano	5.00%	
		Lebani	50.00%	
		Pangasaan	0.00%	
		Pasabu	3.00%	
		Tanete Pao	50.00%	
12	Total	101	19.64%	19.64%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2026

V. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas,

Mamuju, 13 Mei 2026
Pembuat Laporan



AKHMAD TAUFIQ, S. Ip., M. Si.
NIP. 197901022011011006



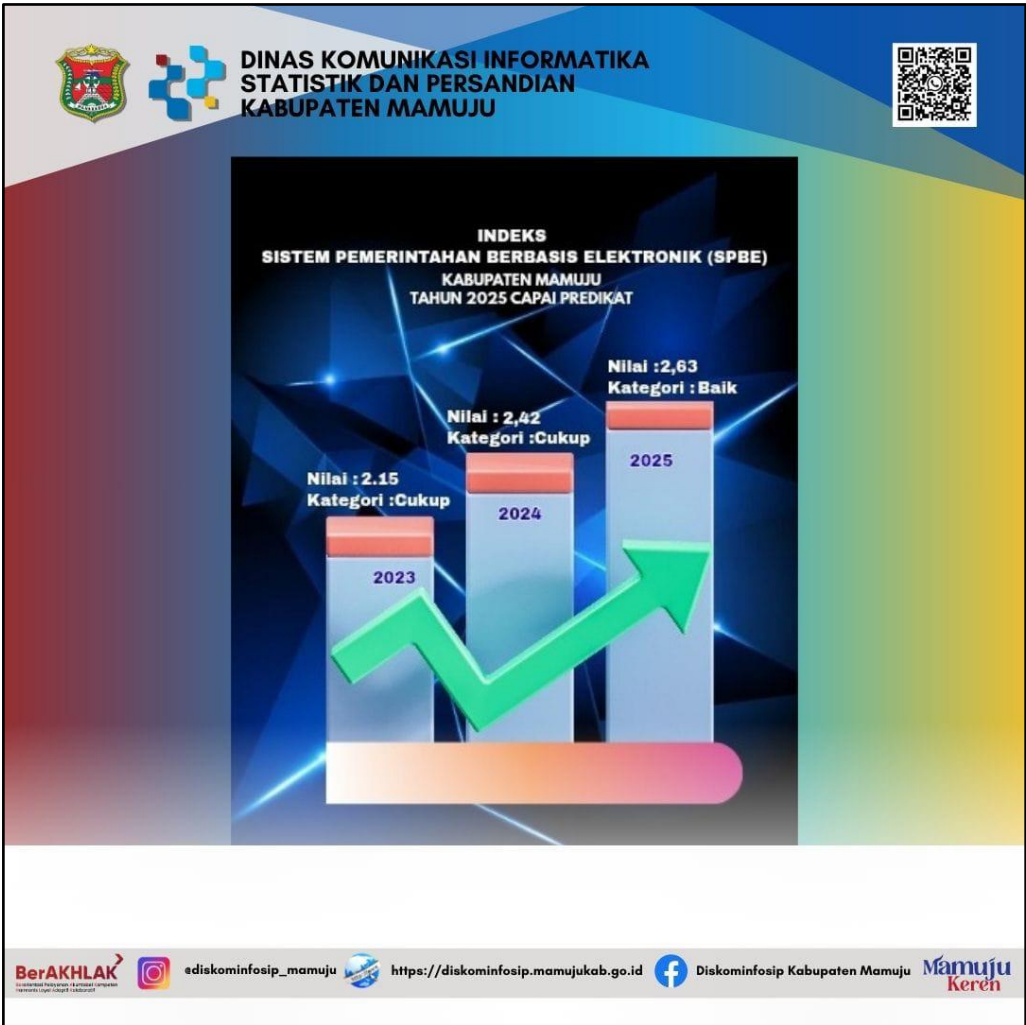
MUHAMMAD FIQRI ADIATMA, S.Kom, M.I.Kom
NIP. 199004302015031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

48

3. Tersedianya data usulan bantuan internet untuk titik BlankSpot pada fasilitas Pendidikan sebanyak 21 titik, fasilitas Kesehatan 5 titik, fasilitas Pemerintahan 5 titik, fasilitas Keagamaan 4 titik dan fasilitas Umum 4 titik. Total usulan pada Triwulan I sebanyak 39 titik.
4. Terlaksananya Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah mendapatkan hasil dengan nilai 2,63 (Baik) dan sekaligus pengumpulan data terkait penggunaan instrumen 47 indikator dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Gambar 4.12
Grafik Peningkatan
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pemerintah Kabupaten Mamuju



Sumber Data : Olahan Data Kementerian PAN-RB, 2026

5. Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan server, website Pemerintah Kabupaten Mamuju serta aplikasi-aplikasi Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

Gambar 4.13
Laporan Pengelolaan dan Pemeliharaan Server, Website Serta Aplikasi Pemerintah Di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511

Website : diskominfosip.mamujukab.go.id | Email : diskominfosip@mamujukab.go.id

LAPORAN PEMELIHARAAN SERVER DAN WEBSITE

DISKOMINFOSIP MAMUJU

BULAN JANUARI – FEBRUARI 2026

LATAR BELAKANG

Ruang server adalah fasilitas yang memusatkan operasi dan peralatan TI diskominfosandi, serta tempat menyimpan, mengelola, dan menyebarkan datanya. Ruang server memiliki sistem jaringan yang paling kritis dan vital bagi kelangsungan operasional SPBE.

Konsekuensinya, keamanan dan keandalan perangkat keras adalah prioritas utama bagi instansi. Selain peralatan teknis, ruang server juga memerlukan sejumlah besar infrastruktur fasilitas untuk menjaga perangkat keras dan lunak tetap berjalan. Ini termasuk subsistem daya, catu daya tak terputus (UPS), sistem ventilasi dan pendingin, generator cadangan, dan kabel untuk terhubung ke operator jaringan eksternal. Para penyedia fasilitas server selalu melakukan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga seluruh server, storage dan IT equipment agar tidak pernah terjadi downtime (zero downtime). Kerugian yang ditimbulkan akibat downtime cukup besar, oleh karena itu pemeliharaan server pada tingkat perusahaan dan pemerintahan sangat perlu dilakukan secara berkala.

Salah satu tujuan pemeliharaan adalah untuk memastikan keandalan perangkat dan fasilitas yang ada pada tingkat maksimum dengan mengambil langkah-langkah pencegahan secara proaktif untuk mengelola atau menjadwalkan downtime diluar jam kerja seperti untuk maintenance, migrasi dan lainnya, juga untuk mengurangi downtime karena adanya perangkat infrastruktur yang kurang atau sudah tidak berfungsi. Maka mengingat dan menimbang hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sebagai dinas yang memiliki

tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik salah satunya adalah mengelola Infrastruktur Server Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju melakukan kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Ruang Server yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasional SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari Pekerjaan Pemeliharaan Server adalah melakukan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan teknologi informasi, peralatan jaringan komunikasi, dan perangkat pendukung operasional pada Ruang Server Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju secara berkala.

B. Tujuan

1. Terjaganya keberlangsungan operasional ruang server Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dari downtime yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
2. Menurunkan biaya operasional Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
3. Perangkat teknologi informasi dan perangkat jaringan komunikasi dapat berjalan dengan lancar sehingga meningkatkan efektifitas aktifitas SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

KONDISI SERVER DISKOMINFOSIP

A. DNS Server

Server Load

Server Load (Server : ns1.mamujukab.go.id)

Server online since: 74 days, 2:19 hours

Users Online: 0

System load 1 minute: 0.03

System load 5 minutes: 0.05

System load 15 minutes: 0

Storage

Disk Usage (Server : ns1.mamujukab.go.id)

Filesystem	Type	Size	Used	Available	Use%	Mounted on
udev	devtmpfs	3.9G	0	3.9G	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	788M	75M	711M	10%	/run
/dev/sda2	ext4	915G	6.3G	893G	1%	/
/dev/sda1	vfat	511M	5.9M	506M	2%	/boot/efi

Penggunaan Memory

Memory Usage (Server : ns1.mamujukab.go.id)

MemTotal:	7.67 GB
MemFree:	2.17 GB
MemAvailable:	4.86 GB
Buffers:	1.0x GB
Cached:	1.91 GB
SwapCached:	0
Active:	1.69 GB
Inactive:	3.22 GB
ActiveMem:	52.75 MB
InactiveMem:	2.31 GB
ActiveFile:	1.69 GB
InactiveFile:	528.7 MB

Service Status

Status of Services (Server : ns1.mamujukab.go.id)

Web-Server:	Online
FTP-Server:	Online
SMTP-Server:	Online
POP3-Server:	Online
IMAP-Server:	Online
DNS-Server:	Online
MySQL-Server:	Online

CPU Info

CPU Info (Server : ns1.mamujukab.go.id)

processor 0:	0
vendor_id 0:	GenuineIntel
cpu family 0:	6
model 0:	84
model name 0:	Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz
stepping 0:	3
microcode 0:	0x0
cpu MHz 0:	2900.499
cache size 0:	6192 KB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

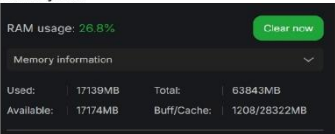
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Host Server

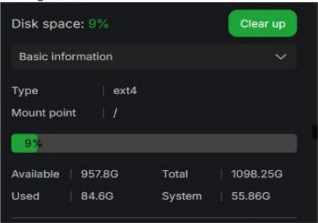


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

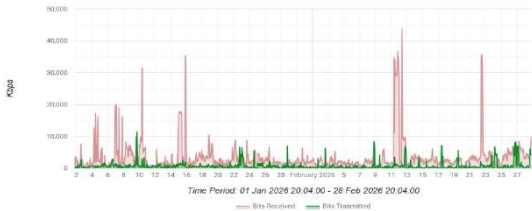
Memory Info



Storage Info



C. Network Traffic



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEGIATAN PEMELIHARAAN SERVER

Rincian kegiatan maintenance terlampir pada maintenance log server.

KEGIATAN PEMELIHARAAN WEBSITE

Rincian kegiatan maintenance terlampir pada maintenance log pemeliharaan website.

Demi kelancaran pemanfaatan aplikasi dan pelaksanaan maintenance, pekerjaan ini harus dapat dikelola dengan benar. Untuk itu perlu adanya kerjasama dari setiap staf yang terlibat untuk dapat saling menjaga dan memanfaatkan aplikasi dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat optimal dalam membantu pelaksanaan pekerjaan.

Demikian laporan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Mengetahui
Kepala Diskominfo Mamuju



AKHMAD TAUFIQ, S.Jd, M.Si
NIP. 1979010220110110006

Penanggung Jawab
Ruang Server



DEDY SUTARNA
NIP. 198402152005011003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2026

4.1.3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Tabel 4.3
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,00	Tahap Penilaian

Sumber Data : IKU DISKOMINFOSIP 2025-2029

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) bertujuan meningkatkan kualitas data statistik sektoral dengan rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2025 tidak dilaksanakan karena adanya perubahan proses bisnis EPSS di tingkat pusat, akan tetapi tahapan pelaksanaan evaluasi tersebut tetap dilaksanakan untuk mempersiapkan EPSS tahun 2026 depan yaitu dengan Penunjukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju sebagai Perangkat Daerah dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Tahun 2026, sesuai dengan SK Bupati Mamuju Nomor 145 Tahun 2026 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2026 dan Pengelolaan e-Walidata pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

Gambar 4.14
SK Bupati Mamuju Nomor 145 Tahun 2026
tentang Penunjukan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju
Dalam Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor
Tahun 2026



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 145 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU DALAM
PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
TAHUN 2026

BUPATI MAMUJU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengukur kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, perlu dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Perangkat Daerah Kab. Mamuju yang akan di evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2026

4.1.4 Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah

Tabel 4.4
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	60	12,5

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sudah terealisasi sebanyak 30 ASN yang telah memiliki dan memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersebut;

Gambar 4.15
Laporan Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

 PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511 Website : diskominfoip.mamujukab.go.id Email : diskominfoip@mamujukab.go.id													
LAPORAN DATA AKTIVASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)													
Triwulan I 2026													
No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah ASN					Jumlah	Jumlah ASN yang Sudah Melakukan Aktivasi					Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	ASN	PPPK		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	ASN	PPPK	
1	SEKRETARIAT DAERAH	6	12	1	110	26	155	0	0	0	1	0	1
2	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	0	4	2	22	4	32	0	0	0	0	0	0
3	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	1	4	0	37	3	45	0	0	0	0	0	0
4	DINAS PERHUBUNGAN	1	4	7	26	8	46	0	0	0	0	0	0
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	4	1	59	1	65	0	0	0	0	0	0
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	4	0	18	6	28	0	0	0	0	0	0
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	4	1	17	2	25	0	0	0	0	0	0
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1	4	3	39	8	55	0	0	0	0	0	0
9	DINAS PERDAGANGAN	1	4	4	33	1	43	0	0	0	0	0	0
10	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN	1	4	2	22	4	33	0	0	0	0	0	0
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	4	2	30	2	39	0	0	0	0	0	0
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	3	2	22	5	32	0	0	0	0	0	0
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	3	2	19	1	26	0	0	0	0	0	0
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	4	2	26	6	39	0	0	0	0	0	0
15	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	4	8	1460	1388	2861	0	0	0	3	0	3
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	0	3	7	180	0	190	0	0	0	0	0	0
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	5	1	25	2	34	0	0	0	0	0	0
18	DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	5	9	36	3	54	0	0	3	0	0	3
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIAHAN (BKPP)	1	4	2	28	9	44	0	0	0	0	0	0
20	BADAN KESBANGPOL	1	3	1	19	4	28	0	0	1	3	0	4
21	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0	5	10	58	49	122	0	0	0	0	0	0
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	1	4	1	21	5	32	0	0	0	0	0	0
23	DINAS KESEHATAN	1	4	0	66	0	71	0	0	0	0	0	0
24	PUSKESMAS BAMBU	0	0	1	155	0	156	0	0	1	0	0	1
25	PUSKESMAS CAMPALOGA	0	0	1	48	0	49	0	0	0	0	0	0

26	PUSKESMAS KALUMPANG	0	0	1	12	0	13	0	0	0	0	0	0
27	PUSKESMAS KARAMA	0	0	1	8	0	9	0	0	0	0	0	0
28	PUSKESMAS KARATUNG	0	0	1	20	0	21	0	0	0	0	0	0
29	PUSKESMAS LELING	0	0	1	24	0	25	0	0	0	0	0	0
30	PUSKESMAS RANGAS	0	0	1	93	0	94	0	0	0	3	0	3
31	PUSKESMAS TAPALANG	0	0	1	48	0	49	0	0	0	0	0	0
32	PUSKESMAS TARAILU	0	0	1	42	0	43	0	0	0	0	0	0
33	PUSKESMAS TOPORE	0	0	1	19	340	360	0	0	0	0	0	0
35	INSPEKTORAT	1	5	1	40	4	51	0	0	0	0	0	0
36	BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	1	4	7	26	6	44	0	0	0	0	0	0
37	SEKRETARIAT DPRD	0	1	1	51	0	53	0	0	0	0	0	0
38	DINAS SOSIAL	1	4	1	19	8	33	0	0	0	0	0	0
39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	0	4	2	19	3	28	0	0	0	0	0	0
40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	1	3	1	26	5	36	0	0	0	0	0	0
41	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	1	4	1	16	5	27	0	0	0	0	0	0
42	DINAS PERKEBUNAN	0	3	2	27	2	34	0	0	0	0	0	0
43	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	0	4	2	36	3	45	0	0	0	0	0	0
44	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1	5	2	17	5	30	0	0	2	10	0	12
45	KECAMATAN MAMUJU	0	2	6	11	3	22	0	0	0	0	0	0
46	KECAMATAN SIMBORO	0	2	7	11	2	22	0	0	0	0	0	0
47	KECAMATAN TAPALANG	0	2	7	10	2	21	0	0	0	0	0	0
48	KECAMATAN TAPALANG BARAT	0	2	6	7	3	18	0	0	0	0	0	0
49	KECAMATAN KALUKKU	0	2	6	16	3	27	0	0	0	0	0	0
50	KECAMATAN PAPALANG	0	2	6	15	1	24	0	0	0	2	0	2
51	KECAMATAN SAMPAGA	0	2	5	10	2	19	0	1	0	0	0	1
52	KECAMATAN TOMMO	0	1	6	8	1	16	0	0	0	0	0	0
53	KECAMATAN BONEHAU	0	2	6	9	1	18	0	0	0	0	0	0
54	KECAMATAN KALUMPANG	0	2	6	8	3	19	0	0	0	0	0	0
55	KECAMATAN BALA-BALAKANG	0	2	7	5	0	14	0	0	0	0	0	0
56	Kelurahan Bebanga	0	0	4	12	2	18	0	0	0	0	0	0
57	Kelurahan Binanga	0	0	4	10	2	16	0	0	0	0	0	0
58	Kelurahan Dayangina	0	0	4	5	2	11	0	0	0	0	0	0

59	Kelurahan Galung	0	0	5	5	2	12	0	0	0	0	0	0
60	Kelurahan Karema	0	0	5	8	1	14	0	0	0	0	0	0
61	Kelurahan Kalukku	0	0	5	10	2	17	0	0	0	0	0	0
62	Kelurahan Kasambang	0	0	4	5	3	12	0	0	0	0	0	0
63	Kelurahan Mamunyu	0	0	5	12	2	19	0	0	0	0	0	0
64	Kelurahan Rangas	0	0	4	5	2	11	0	0	0	0	0	0
65	Kelurahan Rimuku	0	0	5	7	3	15	0	0	0	0	0	0
66	Kelurahan Simboro	0	0	5	11	2	18	0	0	0	0	0	0
67	Kelurahan Sinyoyoi	0	0	3	6	2	11	0	0	0	0	0	0
68	Kelurahan Sinyoyoi Selatan	0	0	5	6	2	13	0	0	0	0	0	0
Total		28	157	224	3331	1966	5706	0	1	7	22	0	30

Mamuju, 31 Maret 2026

Mengetahui
Kepala Bidang Persandian



ZULFADLY RASYID, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Gol Iva
Nip : 19840411 201001 1 015

Pembuat Laporan



AYU TRISNAWATI
Nip. 198804282025212130

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2026

2. Terlaksananya pengelolaan Email Sanapati dimana Email Sanapati ini merupakan e-mail khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks sehingga mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. Realisasi surat yang masuk melalui email sanapati 79 surat selama Januari – Maret.

Gambar 4.16
Laporan Data Email SANAPATI Triwulan I
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

 PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Alamat : Jalan K.S. Tubun No. 33 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511 Website : diskominfosip.mamujukab.go.id Email : diskominfosip@mamujukab.go.id				
LAPORAN DATA EMAIL SANAPATI Bulan Januari - Maret 2026				
No	Bulan	Jumlah Surat Di Antar	Jumlah Surat Di Arsipkan	Jumlah Surat Masuk
1	Januari	16	6	22
2	Februari	18	6	24
3	Maret	19	14	33
Total		53	26	79

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2026

4.1.4 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4.5
Analisis Hasil Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupatn Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	BB	Proses

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tepat waktu;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana ASN lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menunjang pelaksanaan tugas;

4.2 Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan RENJA

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam masing-masing bidang urusan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan bidang urusan Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Penyusunan kebijakan yang berupa Peraturan Bupati terkait strategi komunikasi masih dalam tahap pembahasan di Bagian Hukum;
2. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik;
3. Belum optimalnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Saat ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju belum memiliki gedung kantor yang representatif sehingga kebutuhan ruangan khusus untuk melaksanakan kegiatan seperti ruang server, ruang studio, ruang editing, peralatan IT dan peralatan jurnalistik serta publikasi yang terbatas;
5. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan urusan komunikasi dan informatika yaitu Programmer, Teknisi Jaringan, Videografer, Fotografer, Designer Grafis;
6. Ruang pusat data yang tidak memenuhi standar kelayakan.

2. Bidang Urusan Statistik

Permasalahan dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan bidang urusan Statistik antara lain :

1. Belum optimalnya penyusunan metadata statistik sektoral Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;
2. Belum adanya ASN yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan urusan statistik yaitu Statistisi.

3. Belum adanya pejabat Kepala Bidang serta staf yang akan menangani urusan Statistik.

3. Bidang Urusan Persandian

Permasalahan dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan bidang urusan Persandian antara lain :

1. Belum maksimalnya keamanan siber pada sistem informasi Pemerintah Daerah karena tidak ada sumberdaya manusia teknis di bidang Keamanan Jaringan dan Web.
2. Belum terdapatnya pengamanan firewall pada jaringan server Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Triwulan I pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2026, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang dikoordinasikan oleh Sekretariat dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RENJA dan dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan;
2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Mamuju dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal;
3. Rata-rata capaian kinerja seluruh program pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada Triwulan 1 Tahun 2026 ini masih sangat rendah.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari hasil pelaksanaan evaluasi RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Triwulan I Tahun 2026, maka dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan RENJA Reformasi Birokrasi untuk mencapai nilai yang lebih maksimal;
2. Meningkatkan rata-rata capaian kinerja seluruh program dan capaian kinerja anggaran;
3. Meningkatkan koordinasi untuk tercapainya sasaran RENJA Tahun 2026 ke bidang-bidang, koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) maupun lintas Kementerian/Kelembagaan dan lintas sektoral;
4. Tetap melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

Kerjasama di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan kinerja yang optimal.

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk dievaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-periode berikutnya.



Pemerintah Kabupaten Mamuju
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



<https://diskominfoip.mamujukab.go.id>



@diskominfoip_mamuju



Diskominfoip Kabupaten Mamuju